

**PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* DAN
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS
INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
(Studi Kasus pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat)**

Oleh

Ferra Pratiwi Zai, S.E¹, Sahala Purba, S.E., M.Si² dan Arison Nainggolan, S.E., M.Sc²

1) Alumni Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia Medan

2) Dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia Medan

e-mail: ferrapratiwizai@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan *Good Government Governance* (GGG) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan di BPKPAD Kabupaten Nias Barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dan menggunakan sensus dalam mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan kuisioner yang diberikan kepada seluruh pegawai BPKPAD kabupaten Nias Barat. Jumlah seluruh pegawai BPKPAD Kab. Nias Barat sebanyak 50 orang. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. Dari 50 kuisioner yang dibagikan, hanya 47 kuisioner yang dapat diolah. Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa GGG memengaruhi signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia memengaruhi signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Secara bersama-sama GGG dan kompetensi sumber daya manusia memengaruhi signifikan kualitas informasi laporan keuangan pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat.

Kata Kunci : *Good Government Governance, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Informasi Laporan Keuangan.*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the implementation of *Good Government Governance* (GGG) and Human Resources Competence on the quality of financial statement information in BPKPAD, West Nias Regency. This research is a quantitative study using primary data and using census in collecting data. To collect the data, researchers used a questionnaire given to all BPKPAD staff in West Nias Regency. The total number of staff BPKPAD Kab. West Nias as many as 50 people. To analyze the data, researchers used descriptive statistical analysis methods, classic assumption tests and multiple linear regression analysis. Of the 50 questionnaires distributed, only 47 questionnaires could be processed. Partially, the results of the study show that GGG has a significant influence on the quality of financial statement information and the competence of human resources has a significant influence on the quality of financial statement information. Together GGG and human resource competencies significantly influence the quality of financial statement information on BPKPAD in West Nias Regency.

Keywords : *Good Government Governance, Human Resources Competency and Information Quality of Financial Statement*

I. PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan otonomi daerah sebagai bagian dari usaha pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan hingga pada tingkat daerah. Dengan menerapkan otonomi daerah tersebut maka masing-masing daerah memiliki wewenang untuk mengatur sendiri segala urusan pemerintahannya, serta dengan adanya wewenang tersebut maka pemerintah daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang berisi gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini BPK diberikan berdasarkan tiga kriteria umum, yaitu: Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kepatuhan terhadap Undang-undang yang berlaku, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) pedoman yang digunakan BPK dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, ada empat jenis opini diantaranya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Selain opini dari BPK, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat juga

apabila telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) antara lain :relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami. Sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Nias Barat pada tahun 2013-2016 menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan opini audit. Pada tahun 2013-2014 BPK sebelumnya tidak memberikan pendapat (*Disclaimer*), tahun 2015-2016 mengalami peningkatan dan perubahan yang lebih baik yakni meraih opini WDP. Hal tersebut menggambarkan telah adanya perbaikan entitas pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang wajar sekalipun belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos-pos yang dikecualikan agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Namun sangat disayangkan pada tahun 2017, BPK tidak memberikan pendapat (*Disclaimer*) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kab. Nias Barat. Ini berarti Kab. Nias Barat tidak bisa mempertahankan opini WDP tersebut bahkan mungkin sulit untuk mengejar opini WTP.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka diharapkan suatu pemerintah tidak hanya mengejar

opini WTP tetapi juga harus menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Pemikiran ini sejalan dengan adanya tuntutan *good government governance* dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam kerangka otonomi memerlukan prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih (Mardiasmo, 2002). Selain itu, laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh ilmu akuntansi sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten.

Melihat hal tersebut dan pentingnya kualitas informasi laporan keuangan, maka penulis tertarik mengkaji penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan *Good Government Governance* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Nias Barat)”.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi suatu masalah sebagai berikut: 1) Berdasarkan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah Kab. Nias Barat selama 5 tahun tidak pernah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 2) Kualitas informasi laporan keuangan Kab. Nias Barat tahun 2017 masih *Disclaimer* (Tidak Memberikan Pendapat). 3) Berdasarkan penelitian terdahulu adanya perbedaan atau ketidakkonsistenan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Penerapan *Good Government Governance* terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada BPKPAD Kab. Nias Barat. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi

Laporan Keuangan pada BPKPAD Kab. Nias Barat. 3) Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Penerapan *Good Government Governance* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada BPKPAD Kab. Nias Barat.

II. LANDASAN TEORI

1. Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kualitas adalah tingkat, baik buruknya sesuatu, dan taraf atau derajat. Kualitas pelaporan keuangan adalah kegiatan melaporkan informasi keuangan guna memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik dengan mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar (Yadiati, 2017). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 No. 01 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), komponen pokok Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. *Good Government Governance*

Lembaga Administrasi Negara (2000) menyimpulkan bahwa *Good Government*

Governance adalah menyelenggarakan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 merumuskan arti *Good Government Governance* adalah pemerintahan yang mengemban, menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Ada sembilan indikator untuk mengukur *Good Government Governance* adalah sebagai berikut (UNDP, 1997): 1).Partisipasi. 2).Kepastian hukum. 3).Transparansi. 4).Responsif. 5).Orientasi konsensus. 6).Kesetaraan. 7).Efisien dan efektif. 8).Akuntabilitas. 9).Visi strategis.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Spencer (1993), mengatakan kompetensi adalah suatu yang mendasari karakteristik dari suatu individu yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan. Menurut Werther dan Davis (Sutrisno, 2012), sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Menurut Mangkunegara (2012), kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya.

Menurut Spencer (1993), beberapa karakteristik kompetensi sumber daya manusia terdiri dari: Tanggung jawab, perilaku, pengetahuan, dan keterampilan (*skill*).

4. Hipotesis Penelitian

5.

6.

H₁: Penerapan *Good Government Governance* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

7.

H₂: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

8.

H₃: Penerapan *Good Government Governance* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer. Objek/lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kab. Nias Barat di Jalan Soekarno Hatta No. 01, Lahomi, Kab. Nias Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BPKPAD Kab. Nias Barat. Sampel dalam penelitian ini seluruh pegawai yang berjumlah 50 responden. Teknik pengampilan sampel dalam penelitian ini yaitu metode sensus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner, dan observasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS.

Adapun definisi operasional masing-masing variabel yaitu sebagai berikut:

1. *Good Government Governance* (X₁)

Good Government Governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik berupa sistem yang mengatur dan mengontrol urusan negara pada

semua tingkat, terkait dengan hak dan kewajiban pihak-pihak yang berada di dalamnya.

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala *Likert* yang terdiri dari 11 pernyataan, dan diukur dengan 9 indikator antara lain: partisipasi, kepastian hukum, transparansi, responsif, orientasi konsensus, kesetaraan, efisien dan efektif, akuntabilitas, dan visi strategis.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₂)

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala *Likert* yang terdiri dari 5 pernyataan, dan diukur dengan 4 indikator antara lain: tanggung jawab, perilaku, pengetahuan, dan keterampilan (*skill*).

3. Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)

Kualitas Informasi Laporan Keuangan adalah tingkat baik buruknya suatu laporan keuangan pemerintah daerah dengan mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar.

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala *Likert* yang terdiri dari 9 pernyataan, dan diukur dengan 4 indikator antara lain: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Gambaran Umum Responden.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan *good government governance*

dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan (studi kasus pada BPKPAD Kab. Nias Barat). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan bantuan alat statistik SPSS 15.0. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disampaikan langsung kepada responden. Kuesioner didistribusikan kepada semua OPD sebanyak 50 buah. Dari seluruh kuesioner yang sudah disebar diperoleh 47 kuesioner yang kembali dan dapat diuji dan 3 kuesioner yang tidak kembali.

Responden dalam penelitian ini didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 25 orang atau 53,2%, dan sisanya sebanyak 22 orang atau 46,8% berjenis kelamin perempuan.

Responden dalam penelitian ini didominasi oleh lulusan Strata 1 (S1) yaitu sebanyak 30 orang atau 63,8%, lulusan Diploma (DIII) terdiri dari 9 orang atau 19,2%, lulusan Pascasarjana (S2) terdiri dari 4 orang atau 8,5% dan sisanya merupakan lulusan SMA/Sederajat yang terdiri dari 4 orang atau 8,5%.

Responden dalam penelitian ini sebanyak 17 orang atau 36,2% memiliki latar belakang bidang akuntansi, 12 orang atau 25,5% dengan latar belakang manajemen, dan sisanya sebanyak 18 orang atau 38,3% merupakan dari bidang atau jurusan lain.

Responden dalam penelitian ini sebanyak 20 orang atau 42,6% bekerja selama 1-5 tahun, dan sisanya terdiri dari 27 orang atau 57,4% bekerja selama 5-10 tahun.

b. Analisis Statistik Deskriptif.

Analisis ini meliputi jumlah penelitian, nilai minimum, nilai maximum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Berikut adalah

hasil analisis deskriptif dengan bantuan *software* Statistik.

Statistic Descriptive

Variabel	N	Min	Max	Mean	SD
KILK	47	25	36	33,79	2,911
GCG	47	32	44	40,26	3,486
KSDM	47	15	20	19,02	1,847

Sumber: Diolah dari SPSS, 2019

c. Uji Kualitas Data

1). Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Jika *Correlated Item-Total Correlation* hitung > nilai r tabel dan nilainya positif, maka butir pertanyaan pada setiap variabel penelitian dinyatakan valid (Ghozali, 2013).

Semua nilai r hitung untuk masing-masing pernyataan tentang GCG, kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas informasi laporan keuangan lebih besar dari r table (0,294). Hal ini berarti bahwa setiap butir pertanyaan dalam penelitian ini adalah valid.

2). Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan *reliable* (andal), jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dinyatakan *reliable* jika nilai *cronbach alpha* > 0.60 (Ghozali, 2013).

Dari semua nilai ketiga variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

d. Uji Asumsi Klasik

1). Uji Normalitas

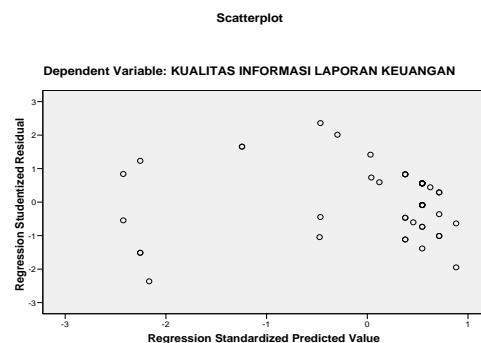
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,533. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi ini terdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* > 0,05.

		Standardized Residual
N		47
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,97801929
Most Extreme Differences	Absolute Positive	,118
	Negative	-,118
Kolmogorov-Smirnov Z		,807
Asymp. Sig. (2-tailed)		,533

Sumber : diolah SPSS 2019

2). Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas terlihat titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat diartikan tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi.



3). Uji Multikolinearitas

Jika nilai *tolerance* >0,1 atau nilai *Variance Inflation Factor(VIF)* < 10 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen pada penelitian ini tidak terjadi korelasi atau tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

Variabel	Tolerance	VIF
GGG	0.404	2.477
KSDM	0.404	2.477

Sumber : diolah SPSS 2019

e. Uji Hipotesis

1). Uji Parsial (Uji t)

Variabel *good government governance* memiliki nilai signifikan 0,00 dan kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai signifikan 0,02. Hal ini berarti variabel *good government governance* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dan begitu juga dengan variabel kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan, karena masing-masing variabel bebas memiliki nilai signifikansinya lebih rendah dari 0,05 (α).

Dari hasil secara keseluruhan, dapat dibuat suatu persamaan baru yakni:
 $Y = 4,904 + 0,417GGG + 0,636SDM + \epsilon$

2). Uji Simultan (Uji F)

Dari hasil tersebut dapat diketahui nilai F signifikan $0,00 < (\alpha)$ tingkat signifikansi 5% atau 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi memiliki tingkat kesesuaian model yang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel *good government governance* dan kompetensi sumber daya manusia secara bersama-sama dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan.

Model	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2	141,001	57,514	,000(a)
Residual	44	2,452		
Total	46			

Sumber : diolah SPSS 2019

3). Uji Koefisien Determinan (R^2)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinan (R^2) yang ditunjukkan pada tabel di bawah, diperoleh nilai *adjusted R-square* sebesar 0,711 atau 71,1%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 71,1% kualitas informasi laporan keuangan di BPKPAD Kab. Nias Barat dipengaruhi oleh faktor *good government governance* dan kompetensi sumber daya manusia, sedangkan sisanya sebesar 28,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,850(a)	,723	,711	1,566

Sumber: Diolah dari SPSS, 2019

2. Pembahasan

a. Pengaruh *Good Government Governance* terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis 1 (H1) yang menyatakan bahwa variabel *good government governance* berpengaruh positif

signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada BPKPAD Kab. Nias Barat. Berdasarkan tabel 4.10 tentang uji statistik t menyatakan bahwa *good government governance* mempunyai nilai signifikansi $0,00 < 0,05$ (α). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel *good government governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut dapat dibuktikan juga dengan nilai r *product moment* (Sugiyono, 2012) dimana t hitung ($4,001$) $>$ t tabel ($1,68$).

Pelaksanaan *good government governance* pada BPKPAD Kab. Nias Barat dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan visi strategis, sehingga sumber daya daerah yang berada dalam pengelolaan pemerintah mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azlim dkk (2012), Tua (2015) yang menyatakan *good government governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

b. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis 2 (H_2) yang menyatakan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada BPKPAD Kab. Nias Barat. Berdasarkan tabel 4.10 tentang uji statistik t menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai nilai signifikansi $0,02 < 0,05$ (α). Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut dapat dibuktikan juga dengan nilai r *product moment* (Sugiyono, 2012) dimana t hitung ($3,233$) $>$ t tabel ($1,68$).

Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif. Adanya kompetensi sumber daya manusia maka akan mendukung ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan. Jadi, kesimpulannya adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kadek dkk (2014), dan Putriasri (2017) yang menyatakan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

c. Pengaruh Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga (H_3) yaitu bahwa *good government governance* dan kompetensi sumber daya manusia secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Besar pengaruh *good government governance* dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada BPKPAD Kab. Nias Barat ditunjukkan dengan hasil uji koefisien determinan (R^2) sebesar $0,711$. Artinya, $71,1\%$ kualitas informasi laporan keuangan pada BPKPAD Kab. Nias Barat dipengaruhi oleh *good government governance* dan kompetensi sumber daya

manusia. Hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan nilai r *product moment* (Sugiyono, 2012) dimana F hitung (57,514) > F tabel (3,209). Hal ini berarti apabila *good government governance* dan kompetensi sumber daya manusia dapat diterapkan dan dimplementasikan dengan baik maka kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ika dan Nur (2014) menunjukkan bahwa Penerapan *Good Government Governanced* dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Penerapan *good government governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
- Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
- Koefisien determinan penelitian ini adalah 0,711 yang memperlihatkan bahwa 71,1% kualitas informasi laporan keuangan dipengaruhi oleh *good government governance* dan kompetensi sumber daya manusia. Sisanya sebesar 28,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Jadi, penerapan *good government governance* dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan

mempunyai pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

2. Saran

- Bagi pemerintah, hendaknya lebih meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* untuk mendorong pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Bagi OPD yang ada di BPKPAD Kab. Nias Barat, terutama pegawai bidang keuangan memiliki latar belakang atau pendidikan yang berbeda-beda (tidak hanya dari akuntansi) dan apabila pegawai ditempatkan pada posisi penyusun laporan keuangan supaya dapat diberi pembekalan dasar dasar akuntansi dan mengadakan pelatihan-pelatihan tentang akuntansi sehingga lebih menunjang pada pencapaian laporan keuangan yang berkualitas.
- Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambahkan referensi yang lebih banyak lagi dan lebih memperluas objek penelitian. Selain itu juga disarankan untuk menambah variabel lain di luar variabel yang telah diteliti seperti sistem pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan. Serta disarankan untuk melakukan pengumpulan data secara lebih komprehensif baik tentang teknik pengumpulannya maupun kedalaman informasi yang dapat diperoleh dari instrumen yang digunakan, hal tersebut diantaranya dapat dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam secara langsung pada responden disamping penyebaran kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Azlim dkk. 2012. *Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan*. Jurnal Akuntansi.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Kadek dkk. 2014. *Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi. Vol-2 (No. 1).
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI . 2000. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah*. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Institut Pemerintah.
- Mangkunegara. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Sodikarya.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Putriasri. 2017. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya manusia, Penerapan Akuntansi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas LKPD Provinsi DIY*. Skripsi Akuntansi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Spencer, M. Lyle. 1993. *Competence at Work*. Canada : John Wiley & Sons, Inc.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung.
- Sutrisno. 2012. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi (8th ed.)*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Tua, & Sari. 2015. *Pengaruh Good Government Governance, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan*. E-Jurnal Jurusan Akuntansi Universitas Riau. Pekanbaru.
- United Nations Development Program (UNDP). 1997. *Governance For Sustainable Human Development*.
- Yadiati, & Winwin. 2017. *Kualitas Pelaporan Keuangan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.